

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Di samping itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Sujarweni (2015:231), otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah, dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut (Abdullah, 2015).

Kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antari, 2018). Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan

pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memerlukan ukuran penilaian yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beraneka ragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran (Mahsun, 2013). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan ratio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Salah satu perwujudan otonomi daerah dalam mengelola keuangan terdapat pada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan maraknya pembangunan-pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Menurut website BPS (2016), perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2016 mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,54% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang tercatat sebesar 5,43%. Ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan triwulan laporan terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi swasta, khususnya konsumsi rumah tangga, serta investasi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan impor luar negeri di tengah perbaikan ekspor yang relatif terbatas menjadi penahan laju perekonomian triwulan laporan untuk tumbuh lebih tinggi. Ditinjau dari sisi lapangan usaha,

meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta pertanian menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2016.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan IV 2016 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah periode tersebut diproyeksikan berada di kisaran 5,2% - 5,6%. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan terjadi pada dua lapangan usaha utama Jawa Tengah, yaitu lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan, sedangkan lapangan usaha pertanian diprediksi tumbuh melambat seiring dengan perkiraan baru dimulainya musim tanam (MT) III 2016.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, maupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (*Gross Domestic Product*) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Laju pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan produktifitas nasional dengan dana investasi dalam maksimalisasi total produksi dapat mendorong tingkat laju pertumbuhan nasional.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah itu sendiri.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan, pemerintah dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Selain Pendapatan Asli daerah (PAD), salah satu komponen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan APBD baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari dana perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya (Juliawati, 2012).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari Dana Bagi hasil (DBH) adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperlihatkan potensi daerah penghasil (Djpk Depkeu).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendanai kebutuhan daerah otonomnya, maka pelaksanaan desentralisasi menjadi prioritas dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jenis dana ini adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan setiap tahunnya dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Definisi Dana Alokasi Umum (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dari DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dalam meningkatkan perekonomian nasional seperti penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dapat mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Konsekuensi dari adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dapat dicapai. Kenyataan yang terjadi adalah masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2016) pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah sehingga pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik. Apabila pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tersebut, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat.

Leverage merupakan besarnya asset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya melalui modal sendiri. Menurut Darmanto (2012), *leverage* yang merupakan faktor finansial mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka pengawasan dari pihak kreditor juga akan menjadi lebih ketat untuk menjamin pengembalian dana yang dipinjamkan, pengawasan yang lebih ketat tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka (Ilmiyyah, 2017).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah (2015). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambah variabel independen pertumbuhan ekonomi dan *leverage*. Selain itu, cakupan wilayah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan periode penelitian ini adalah tahun anggaran 2013-2017.

Abdullah (2015) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sari (2016) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

sedangkan *Leverage*, Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Budianto (2016) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat dalam hal pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, peneliti dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang sektor publik pemerintah daerah.

1.4.2 Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan dan informasi terhadap arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.3 Bagi Pembaca

Pembaca dapat menambah wawasan atau pengetahuan serta bahan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori dalam analisis penelitian ini (variabel dependen (Y), penelitian terdahulu, landasan teori, variabel independen (X), pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari menentukan populasi dan sampel, sumber data, instrument data, dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengumpulan data, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

